

TIKTOK SHOP DAN TARIF IMPOR TRUMP: ANALISIS LITERATUR TENTANG KETIMPANGAN DALAM SISTEM PASAR BEBAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Miko Tri Afandi
(22053006)

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
miko.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstrak

Perdagangan bebas merupakan elemen utama dalam sistem ekonomi global modern, yang ditandai dengan penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi demi mewujudkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik manfaatnya, sistem pasar bebas juga menciptakan berbagai bentuk ketimpangan, baik antarnegara maupun di dalam negara. Negara-negara maju cenderung mendominasi perdagangan global dengan penguasaan teknologi dan modal, sementara negara berkembang kerap terjebak dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah berdaya saing rendah. Ketimpangan ini juga terjadi secara domestik, ditandai dengan melemahnya sektor UMKM, eksploitasi sumber daya, dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dampak perdagangan bebas dan ketimpangan yang ditimbulkannya. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan sistem pasar bebas melalui kebijakan proteksionisme selektif, pajak progresif, subsidi, program jaring pengaman sosial, serta investasi pada infrastruktur dan pendidikan. Kasus TikTok Shop di Indonesia dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat menjadi bukti konkret bagaimana perdagangan bebas, jika tidak diimbangi oleh intervensi negara, dapat memperdalam ketimpangan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perdagangan bebas dalam menciptakan kesejahteraan merata sangat bergantung pada keterlibatan aktif negara. Negara harus tidak hanya menjadi fasilitator ekonomi, melainkan juga aktor utama dalam menjamin keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, sistem pasar bebas tidak menjadi alat reproduksi ketimpangan, tetapi sarana mewujudkan kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perdagangan Bebas, Ketimpangan Ekonomi, Sistem Pasar Bebas, Peran Negara, UMKM

Abstract

Free trade is a central element in the modern global economic system, characterized by the removal of trade barriers such as tariffs, quotas, and subsidies to promote efficiency and economic growth. However, beyond its benefits, the free market system also generates various forms of inequality, both between nations and within countries. Developed countries tend to dominate global trade through control of technology and capital, while developing nations often remain stuck as low-value raw material suppliers. This imbalance also occurs domestically, marked by the weakening of small and medium enterprises (SMEs), exploitation of resources, and unequal wealth distribution. This study employs a literature review approach to analyze the impact of free trade and the resulting inequalities. It highlights the crucial role of the state in regulating, supervising, and balancing the free market system through selective protectionist policies, progressive taxation, subsidies, social safety net programs, and investment in infrastructure and education. Case studies such as TikTok Shop in

Indonesia and protectionist policies in the United States serve as concrete evidence that, without state intervention, free trade can exacerbate economic disparities. The findings show that the success of free trade in generating equitable prosperity depends heavily on active state involvement. The state must act not only as an economic facilitator but also as a key agent in ensuring social and economic justice. Thus, the free market system should not become a tool for reproducing inequality but rather a means to achieve inclusive and sustainable welfare.

Keywords: Free Trade, Economic Inequality, Free Market System, Role of the State, SMEs

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas merupakan salah satu konsep ekonomi yang mengacu pada kebijakan, di mana negara-negara menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi. Hal ini memungkinkan arus barang dan jasa bergerak bebas antar negara. Dalam sistem ini, pasar bebas berfungsi sebagai cara utama dalam menentukan harga dan distribusi sumber daya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Sistem ini banyak diterapkan dalam era globalisasi modern dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif perdagangan bebas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Program-program seperti subsidi bagi sektor yang kurang berkembang, pajak progresif, dan kebijakan redistribusi pendapatan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perdagangan bebas telah menjadi elemen utama dalam sistem ekonomi global modern. Konsep ini merujuk pada kebijakan ekonomi yang memungkinkan barang dan jasa mengalir secara bebas melintasi batas negara tanpa hambatan tarif, kuota, atau regulasi ketat dari pemerintah (Sri Mentari Pombu & Yeni, 2023). Sistem perdagangan bebas didasarkan pada prinsip pasar bebas, di mana mekanisme pasar menentukan harga, produksi, dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dalam sejarahnya, perdagangan bebas telah berkembang melalui berbagai perjanjian dan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) (Indriastuti, 2005). Sistem ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa negara-negara akan mendapat manfaat dari perdagangan dengan mengkhususkan diri pada produksi barang dan jasa yang memiliki biaya produksi lebih rendah dibandingkan negara lain (Setiawati, 2021).

Namun, perdagangan bebas tidak selalu memberikan keuntungan yang merata bagi semua pihak. Ketimpangan ekonomi yang muncul dari sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk dominasi negara maju atas negara berkembang, eksploitasi sumber daya, serta tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, peran negara dalam perekonomian menjadi perdebatan utama dalam sistem pasar bebas. Beberapa pihak berpendapat bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan ini, sementara yang lain percaya bahwa kebijakan proteksionisme justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi global, negara memiliki peran yang kompleks dalam mengatur dan mengawasi perdagangan bebas. Meskipun prinsip dasar pasar bebas menekankan pada minimnya keterlibatan pemerintah, realitas ekonomi menunjukkan bahwa intervensi negara sering kali

dibutuhkan untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi kepentingan domestik. Negara dapat berperan melalui berbagai kebijakan, antara lain:

1. Kebijakan Proteksionisme: Memberlakukan tarif impor, kuota perdagangan, atau subsidi domestik untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional yang tidak sehat.
2. Kebijakan Liberal: Membuka akses pasar dengan menghapus hambatan perdagangan, mendorong investasi asing, dan memperkuat daya saing industri nasional melalui inovasi dan efisiensi (Budiyadi, 2017).
3. Regulasi dan Kebijakan Ekonomi yang Berimbang: Mengatur pasar dengan kebijakan yang mencegah praktik monopoli, melindungi hak pekerja, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas ekonomi (Nanin Koeswidi Astuti, 2024).

Di tingkat nasional, peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar bebas juga mencakup penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri domestik. Tanpa keterlibatan negara yang seimbang, perdagangan bebas dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperdalam kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Perdagangan Bebas

A. Definisi dan Prinsip-prinsip Utama Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas merupakan sistem ekonomi yang mendasari sistem perdagangan internasional, yang memungkinkan barang dan jasa diperdagangkan secara bebas antar negara tanpa adanya hambatan-hambatan yang seperti tarif impor, kuota perdagangan, dan regulasi yang membatasi arus barang dan jasa. Tujuan utama dari perdagangan bebas adalah menciptakan pasar global yang lebih efisien dan kompetitif, memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Schumacher, 2013).

Ada beberapa definisi perdagangan bebas yang berbeda-beda menurut para ahli ekonomi. Berikut adalah beberapa definisi perdagangan bebas menurut para ahli:

Menurut Adam Smith, perdagangan bebas adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli (Meiriza, 2023). Kebebasan ini tidak hanya terbatas pada pasar lokal, tetapi juga memungkinkan penjual dari luar negeri untuk menawarkan barang dan jasa mereka tanpa intervensi pemerintah. Dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), menekankan bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara-negara untuk berfokus pada produksi barang dan jasa yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien dan memperoleh barang lainnya dari negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Adam Smith percaya bahwa konsep ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan.

David Ricardo memperdalam konsep ini melalui teori keunggulan komparatif. David Ricardo menekankan bahwa perdagangan bebas adalah aktivitas perdagangan internasional antara dua negara atau lebih, di mana setiap pihak bebas melakukan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah (Purba et al., 2024). Intinya adalah perdagangan antarnegara tanpa hambatan. Dalam teori ini, Ricardo menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibanding negara lain. Dengan cara ini,

perdagangan bebas dapat menciptakan keseimbangan yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global (Drozd & Miškinis, 2011).

Menurut Paul Krugman, perdagangan bebas tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong inovasi teknologi (Dariah, 2005). Ia berpendapat bahwa dengan perdagangan yang bebas, perusahaan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Dari perspektif hukum dan kebijakan, *World Trade Organization* (WTO) mendefinisikan perdagangan bebas sebagai suatu kondisi di mana tidak ada diskriminasi dalam perdagangan internasional, artinya semua negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem perdagangan global (Kurniawardhani, 2021). WTO juga menekankan pentingnya keterbukaan, transparansi, dan prediktabilitas dalam kebijakan perdagangan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.

Perdagangan bebas memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penghapusan Hambatan Perdagangan (Tarif, Kuota, Subsidi)

Hambatan perdagangan ini biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Namun, perdagangan bebas berupaya menghapus atau mengurangi hambatan ini (Jung, 2021). Beberapa hambatan utama yang dihapus dalam perdagangan bebas adalah:

a) Tarif (Pajak Impor)

Tarif adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh negara pada barang impor. Tarif ini bisa membuat barang impor lebih mahal, yang pada akhirnya melindungi produsen dalam negeri dari kompetisi internasional. Namun, dalam perdagangan bebas, tarif ini akan dihapuskan atau diperkecil agar perdagangan antarnegara dapat berjalan dengan lebih lancar dan mengurangi biaya yang dibebankan kepada konsumen. Contoh: Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas, seperti dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA), biasanya sepakat untuk mengurangi atau menghapus tarif antara anggota-anggota AFTA untuk memfasilitasi perdagangan bebas di kawasan tersebut.

b) Kuota

Kuota adalah pembatasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor atau diekspor ke negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Negara menggunakan kuota untuk mengontrol volume perdagangan tertentu, dengan harapan untuk melindungi industri domestik atau menjaga harga tetap stabil. Contoh: Misalnya, negara mungkin memberlakukan kuota pada impor tekstil untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan persaingan yang lebih kuat dari negara-negara lain. Dalam perdagangan bebas, kuota ini akan dihapuskan agar barang bisa diperdagangkan dalam jumlah yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan pasar.

c) Subsidi

Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada industri atau sektor tertentu untuk meningkatkan daya saing mereka. Meskipun subsidi bisa membantu industri domestik untuk bertahan dalam pasar internasional, mereka bisa membuat persaingan menjadi tidak adil bagi negara lain yang tidak memberikan subsidi. Dalam perdagangan bebas, subsidi ini akan dikurangi atau dihapus untuk menciptakan persaingan yang lebih adil. Contoh: Pemerintah memberikan subsidi kepada petani dalam

negeri agar harga produk pertanian domestik tetap kompetitif meskipun produk pertanian tersebut diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Dalam perdagangan bebas, negara-negara berupaya mengurangi penggunaan subsidi yang bisa mengganggu keseimbangan pasar internasional.

2. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini mencakup konsep *Most Favoured Nation* (MFN), yang berarti bahwa suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan perdagangan yang lebih baik kepada satu negara tertentu dibandingkan dengan negara lainnya. Semua negara yang berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas harus menerima manfaat yang sama (Saggi et al., 2022). Hal ini mencegah adanya perlakuan khusus yang dapat menghambat persaingan yang sehat dalam perdagangan internasional.

3. Arus Bebas Barang dan Jasa

Perdagangan bebas tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga mencakup sektor jasa. Salah satu prinsip utama dalam perdagangan bebas adalah arus bebas barang dan jasa, yang berarti bahwa barang dan jasa harus bisa bergerak dengan bebas antarnegara tanpa hambatan yang merugikan (Murwani et al., 2025).

a) Arus Barang

Barang-barang yang diproduksi oleh suatu negara dapat diperdagangkan secara bebas ke negara lain. Dalam perdagangan bebas, tarif dan kuota pada barang dihapuskan, sehingga aliran barang antarnegara dapat lebih lancar. Negara-negara bebas untuk mengeksport produk mereka tanpa pembatasan yang diberlakukan oleh negara importir. Contoh: Dalam perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA (sekarang USMCA), negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sepakat untuk menghapuskan tarif pada banyak produk, sehingga produk dari ketiga negara ini dapat diperdagangkan secara bebas tanpa pembatasan yang membebani.

b) Arus Jasa

Jasa juga merupakan bagian penting dari perdagangan bebas. Dalam ekonomi global saat ini, sektor jasa semakin memainkan peran yang besar dalam perdagangan internasional. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan bebas berusaha untuk membuka akses bagi penyedia jasa asing untuk masuk ke pasar domestik mereka. Begitu pula, penyedia jasa domestik dapat menawarkan jasa mereka ke luar negeri. Contoh: Sektor jasa keuangan (banking, asuransi), jasa teknologi informasi, pendidikan, dan transportasi menjadi bagian dari sektor yang dibuka dalam perdagangan bebas. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi perdagangan internasional seperti WTO (*World Trade Organization*) berupaya untuk memperluas liberalisasi perdagangan jasa.

4. Mekanisme Pasar sebagai Penentu Utama

Prinsip ini mengacu pada pemikiran bahwa pasar harus menjadi mekanisme utama dalam menentukan harga dan alokasi barang serta jasa. Dalam sistem perdagangan bebas, negara tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam menentukan harga atau alokasi sumber daya. Sebaliknya, pasar, yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, akan mengatur harga dan distribusi barang dan jasa (Dewi, 2024).

a) Penentuan Harga oleh Pasar

Dalam sistem pasar bebas, harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Jika suatu barang sangat dibutuhkan dan pasokan terbatas, harga

barang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika pasokan melimpah dan permintaan rendah, harga barang akan turun. Pemerintah tidak akan campur tangan dalam menentukan harga barang dan jasa, karena mekanisme pasar diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Contoh: Jika ada lebih banyak konsumen yang membeli mobil listrik dari mobil berbahan bakar fosil, produsen akan merespons dengan meningkatkan produksi mobil listrik. Oleh karena itu, pasar akan menentukan alokasi sumber daya—seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi—untuk memproduksi barang yang paling banyak diminati.

b) Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya

Pasar bebas mendorong negara-negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Negara yang dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya paling rendah atau yang memiliki keunggulan kompetitif (seperti teknologi yang lebih baik atau tenaga kerja yang lebih murah) akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Ini dapat mengarah pada *specialization* atau spesialisasi yang lebih tinggi, di mana negara fokus pada produksi barang yang mereka produksi paling efisien dan mengimpor barang yang diproduksi lebih efisien di negara lain. Contoh: Jika Indonesia lebih efisien dalam menghasilkan produk kelapa sawit, dan Malaysia lebih efisien dalam menghasilkan produk elektronik, kedua negara akan diuntungkan dengan saling berdagang sesuai dengan keunggulan kompetitif mereka.

Mekanisme Pasar Bebas dan Dampaknya terhadap Perekonomian

A. Cara Kerja Sistem Pasar Bebas

Sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana keputusan mengenai produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan (Utami et al., 2022). Dalam sistem ini, individu dan perusahaan bebas mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan mereka sendiri, sedangkan pasar berfungsi sebagai tempat interaksi antara penjual dan pembeli. Tiga elemen utama yang menggambarkan cara kerja sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Interaksi Penawaran dan Permintaan dalam Penentuan Harga

Dalam pasar bebas, harga ditentukan melalui interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran mencerminkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang tersebut. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran meningkat dan permintaan tetap, maka harga akan turun. Suatu harga akan mencapai titik keseimbangan (*equilibrium price*) di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik ini menunjukkan harga pasar yang efisien, karena semua barang yang diproduksi akan terjual, dan semua konsumen yang bersedia membayar pada harga tersebut dapat memperoleh barang yang diinginkan.

Contoh: Jika harga apel terlalu tinggi dan tidak banyak pembeli, produsen akan menurunkan harga. Jika harga terlalu rendah dan stok cepat habis, harga akan naik. Proses ini terus berlangsung hingga harga stabil pada titik keseimbangan.

2. Alokasi Sumber Daya Berdasarkan Sinyal Pasar

Salah satu keunggulan utama dari pasar bebas adalah kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam sistem ini, harga berfungsi sebagai sinyal

pasar. Harga yang tinggi memberikan sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi, karena dianggap menguntungkan. Sebaliknya, harga yang rendah memberi sinyal bahwa produksi perlu dikurangi karena tidak efisien secara ekonomi. Hal ini membuat sumber daya (tenaga kerja, modal, bahan baku) dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif dan menguntungkan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan peluang ini akan tumbuh, sedangkan yang tidak efisien akan tersingkir secara alami oleh mekanisme pasar.

Contoh: Jika harga energi terbarukan meningkat karena tingginya permintaan, maka investor dan produsen akan mengalihkan modal dan sumber daya ke sektor tersebut, mendorong perkembangan energi bersih.

3. Persaingan dan Inovasi dalam Pasar Bebas

Pasar bebas mendorong adanya persaingan terbuka antar produsen, yang menjadi salah satu kekuatan pendorong utama bagi efisiensi dan inovasi. Dalam sistem ini, perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan produk yang lebih baik, lebih murah, atau lebih inovatif demi menarik konsumen. Persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, berinovasi dalam desain, teknologi, atau pelayanan serta memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada konsumen.

Inovasi ini mendorong kemajuan teknologi, peningkatan kualitas hidup, serta keberagaman produk dan jasa. Dalam jangka panjang, persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar bagi konsumen karena mereka mendapatkan lebih banyak pilihan dengan harga yang kompetitif.

Contoh: Dalam industri ponsel, persaingan antara merek besar mendorong inovasi teknologi seperti kamera canggih, layar lipat, atau integrasi AI, demi memenuhi selera dan kebutuhan pasar yang terus berubah.

B. Potensi Keuntungan Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah sistem ekonomi di mana negara-negara melakukan perdagangan tanpa hambatan seperti tarif, kuota, atau regulasi proteksionis lainnya. Sistem ini memungkinkan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak dengan lebih leluasa antar negara. Dalam praktiknya, perdagangan bebas membawa berbagai keuntungan bagi ekonomi suatu negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Crisela et al., 2024). Beberapa potensi keuntungan utama dari perdagangan bebas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Salah satu manfaat terbesar dari perdagangan bebas adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Dalam sistem perdagangan terbuka, setiap negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan ini bisa berasal dari sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang lebih murah, atau keahlian khusus dalam industri tertentu. Karena tidak ada batasan perdagangan, perusahaan juga terdorong untuk lebih kompetitif, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kualitas barang serta jasa mereka. Persaingan yang lebih luas antar perusahaan juga memaksa mereka untuk mencari cara baru untuk lebih efisien, misalnya dengan menerapkan teknologi yang lebih canggih atau strategi manajemen yang lebih baik.

Contoh: Negara dengan sumber daya mineral yang besar seperti Australia bisa lebih fokus pada industri pertambangan, sementara negara dengan tenaga kerja murah seperti Vietnam bisa lebih unggul dalam industri manufaktur.

2. Perluasan Pasar dan Peningkatan Pilihan Konsumen

Perdagangan bebas memungkinkan produk dari berbagai negara untuk bersaing secara adil di pasar internasional, sehingga konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Konsumen tidak lagi terbatas pada barang buatan dalam negeri, melainkan dapat menikmati produk impor yang lebih murah atau lebih berkualitas. Selain itu, bagi pelaku usaha, perdagangan bebas membuka peluang untuk memperluas pasar mereka ke skala global. Dengan akses ke lebih banyak konsumen dari berbagai negara, bisnis bisa meningkatkan skala produksi, yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi per unit dan meningkatkan keuntungan.

Contohnya, konsumen di Indonesia dapat membeli produk elektronik berkualitas tinggi dari Korea Selatan (Samsung) atau Amerika Serikat (Apple) dengan harga lebih murah dibandingkan jika produk tersebut dibuat secara lokal dengan biaya produksi yang lebih tinggi.

3. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Dalam perdagangan bebas, negara-negara dengan teknologi lebih maju dapat berbagi inovasi dan keahlian mereka dengan negara lain, baik melalui investasi langsung asing (FDI) maupun kemitraan bisnis. Ini memungkinkan negara berkembang untuk mendapatkan akses terhadap teknologi baru yang sebelumnya tidak tersedia di dalam negeri. Investasi asing dari perusahaan multinasional juga sering membawa standar manajemen, keterampilan, dan praktik bisnis yang lebih modern ke negara tujuan, sehingga mempercepat pertumbuhan industri lokal. Dengan meningkatnya keterampilan tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, produktivitas nasional pun meningkat.

Contohnya, perusahaan otomotif asal Jepang seperti Toyota dan Honda membuka pabrik di Thailand dan Indonesia, membawa teknologi manufaktur canggih yang kemudian diadopsi oleh industri lokal.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Perdagangan bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat inovasi industri (Manik, 2022). Dengan lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam pasar global, tingkat produksi nasional meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Negara yang mengadopsi perdagangan bebas juga cenderung lebih menarik bagi investor asing karena menawarkan akses ke pasar global tanpa batasan proteksionis. Arus modal asing yang masuk ini tidak hanya membantu dalam pengembangan infrastruktur dan industri, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Contoh: Negara-negara seperti Singapura dan Irlandia, yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan menarik investasi asing, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi pusat keuangan serta teknologi dunia.

C. Dampak Negatif Perdagangan Bebas

Meskipun perdagangan bebas memiliki banyak manfaat, sistem ini juga membawa berbagai dampak negatif yang dapat mempengaruhi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa tantangan utama yang muncul dari perdagangan bebas meliputi persaingan tidak sehat, eksploitasi sumber daya, kerentanan ekonomi, dan dampak lingkungan (Bawon et al., 2020). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dampak tersebut:

1. Persaingan Tidak Sehat dan Kerugian Industri Domestik

Perdagangan bebas memungkinkan produk dari luar negeri masuk tanpa hambatan seperti tarif atau kuota, sehingga produk impor sering kali lebih murah dibandingkan dengan produk

dalam negeri. Hal ini bisa menyebabkan persaingan tidak sehat yang merugikan industri domestik, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar atau multinasional yang memiliki modal lebih besar dan teknologi lebih maju. Dalam beberapa kasus, perusahaan asing juga dapat menggunakan strategi dumping, yaitu menjual barang di bawah harga produksi untuk menghancurkan pesaing lokal dan kemudian menaikkan harga setelah industri dalam negeri melemah atau bahkan gulung tikar.

Contoh: Banyak industri tekstil lokal di Indonesia mengalami penurunan akibat masuknya produk tekstil murah dari China. Petani lokal kesulitan menjual hasil panen mereka karena impor produk pertanian dengan harga lebih murah dari negara lain.

Ketika industri dalam negeri melemah, tingkat pengangguran bisa meningkat karena banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Jika tidak ada kebijakan yang melindungi industri strategis, suatu negara bisa menjadi sangat bergantung pada impor dan kehilangan kemampuan untuk memproduksi sendiri.

2. Potensi Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja

Dalam sistem perdagangan bebas, tekanan untuk meningkatkan ekspor dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja demi memenuhi permintaan pasar global. Perusahaan sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kondisi kerja yang layak demi menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing.

- a) Eksploitasi Sumber Daya Alam: Negara-negara dengan sumber daya alam melimpah sering kali dieksploitasi oleh perusahaan multinasional yang mengambil keuntungan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, dan degradasi tanah.
- b) Eksploitasi Tenaga Kerja: Untuk menekan biaya produksi, beberapa perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah dengan kondisi kerja yang buruk, termasuk gaji rendah, jam kerja panjang, dan perlakuan tidak manusiawi.

Contoh: Deforestasi besar-besaran di Indonesia akibat pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang sebagian besar diekspor ke pasar internasional. Tanpa regulasi yang ketat, perdagangan bebas dapat memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan serta menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.

3. Kerentanan terhadap Guncangan Ekonomi Global

Ketika suatu negara sangat bergantung pada perdagangan internasional, ekonominya menjadi lebih rentan terhadap perubahan kondisi global. Jika terjadi krisis ekonomi di negara mitra dagang utama, negara yang bergantung pada ekspor atau impor dari negara tersebut juga akan terkena dampaknya. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Jika harga barang ekspor utama turun tajam, negara yang bergantung pada ekspor tersebut bisa mengalami perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.

Contoh:

- a) Krisis ekonomi global tahun 2008 menyebabkan permintaan ekspor dari banyak negara menurun drastis, sehingga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan tingkat pengangguran meningkat.
- b) Negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela mengalami krisis ekonomi ketika harga minyak dunia anjlok, menyebabkan pendapatan negara menurun drastis.

Tanpa diversifikasi ekonomi yang baik, suatu negara bisa menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang serius akibat faktor eksternal di luar kendalinya.

4. Dampak Lingkungan Akibat Peningkatan Aktivitas Perdagangan

Perdagangan bebas sering kali menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mengarah pada eksploitasi sumber daya yang lebih besar, meningkatnya limbah industri, dan naiknya tingkat polusi akibat aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, perdagangan bebas dapat mempercepat kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Beberapa dampak lingkungan yang sering terjadi akibat perdagangan bebas meliputi:

a) Peningkatan Emisi Karbon

Perdagangan bebas memungkinkan pergerakan barang dan jasa antar negara dengan lebih mudah, tetapi di sisi lain, transportasi global menjadi salah satu sumber utama emisi karbon. Proses pengiriman barang dari satu negara ke negara lain menggunakan kapal, pesawat, dan truk memerlukan bahan bakar fosil dalam jumlah besar, yang melepaskan karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Transportasi barang antarnegara (kapal, pesawat, dan truk) meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

b) Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam

Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sering kali mengalami eksploitasi besar-besaran untuk memenuhi permintaan global. Perdagangan bebas mendorong peningkatan produksi komoditas seperti kayu, minyak sawit, dan mineral, yang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Dampaknya, deforestasi yang mengurangi habitat alami bagi satwa liar, kerusakan tanah akibat praktik pertanian intensif, serta berkurangnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

c) Pencemaran Air dan Udara

Pabrik-pabrik yang memproduksi barang dalam skala besar sering kali membuang limbah industri ke sungai, laut, dan udara tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Hal ini terjadi terutama di negara-negara berkembang yang menerapkan standar lingkungan yang longgar untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing industri mereka. Limbah industri dari produksi massal sering kali mencemari lingkungan karena kurangnya regulasi yang ketat di beberapa negara berkembang. Hal tersebut akan berdampak pada lingkungan, seperti air tercemar oleh bahan kimia berbahaya seperti merkuri, arsenik, dan limbah plastik.

Contohnya, limbah plastik dari barang konsumsi global mencemari lautan dan mengancam ekosistem laut. Polusi udara di kota-kota industri di China meningkat drastis karena produksi manufaktur yang tinggi untuk memenuhi permintaan ekspor. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang baik, perdagangan bebas dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan memperburuk dampak perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi pustaka atau studi literatur. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian. Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka mencakup kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan dengan topik penelitian. (Stiedewantara, 2012) Dalam konteks ini, studi pustaka juga dikenal dengan istilah lain seperti kajian pustaka atau tinjauan pustaka.

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka: 1. Menentukan topik penelitian dan membatasi cakupan topik. 2. Mencari sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. 3. Membaca dan menelaah sumber-sumber informasi yang telah ditemukan. 4. Menyusun dan mengorganisasi informasi yang telah ditemukan. 5. Menulis laporan tinjauan pustaka (Hamid et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan dalam Sistem Pasar Bebas: Dimensi dan Manifestasi

A. Ketimpangan Antar Negara (Utara-Selatan)

1. Dominasi Negara Maju dalam Perdagangan Global

Di negara maju, terutama yang berada di belahan bumi utara seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, memiliki peran dominan dalam perdagangan global (Jati, 2012). Mereka menguasai sebagian besar teknologi, modal, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini menyebabkan negara berkembang cenderung menjadi pasar bagi produk-produk negara maju dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing industrinya sendiri. Akibatnya, negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi subordinasi dalam perdagangan internasional, di mana mereka hanya menjadi pemasok bahan baku sementara nilai tambah lebih besar dinikmati oleh negara-negara maju.

2. Ketergantungan Negara Berkembang pada Ekspor Komoditas

Sebagian besar negara berkembang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti minyak, gas, mineral, dan hasil pertanian. Ketergantungan ini membuat perekonomian mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Ketika harga turun, negara-negara ini mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, menyebabkan instabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar tanpa adanya diversifikasi ekonomi membuat negara berkembang sulit untuk lepas dari jebakan ketergantungan.

3. Transfer Nilai dan Keuntungan yang Tidak Merata

Dalam sistem perdagangan global, negara maju sering kali mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan negara berkembang. Hal ini terjadi karena adanya rantai produksi global yang didominasi oleh perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju. Produk mentah dari negara berkembang diolah menjadi barang jadi di negara maju dan dijual dengan harga tinggi, sedangkan negara penghasil bahan mentah hanya menerima keuntungan yang sangat kecil. Keuntungan lebih besar tetap berada di negara maju, sementara negara berkembang hanya menjadi pemasok bahan baku dengan nilai tambah rendah.

4. Dampak Liberalisasi Keuangan terhadap Negara Berkembang

Liberalisasi keuangan, yang memungkinkan aliran modal bebas antar negara, sering kali lebih menguntungkan negara maju dibandingkan negara berkembang. Aliran modal yang masuk ke negara berkembang biasanya bersifat spekulatif dan mudah ditarik kembali ketika terjadi krisis ekonomi, yang dapat menyebabkan instabilitas keuangan dan depresiasi mata uang lokal. Selain itu, banyak perusahaan asing yang menguasai sektor keuangan di negara berkembang, sehingga kebijakan moneter dan fiskal sering kali harus disesuaikan dengan kepentingan investor asing.

B. Ketimpangan di Dalam Negara (Intra-Nasional)

1. Dampak Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Upah

Dalam sistem pasar bebas, perusahaan cenderung mencari tenaga kerja dengan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini sering menyebabkan ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, di mana pekerja dengan keterampilan rendah mendapatkan upah yang sangat rendah sementara pekerja dengan keterampilan tinggi mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar. Selain itu, adanya fleksibilitas tenaga kerja juga menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja, terutama di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai (Wibowo et al., 2023). Kesenjangan gender juga menjadi masalah di pasar tenaga kerja, di mana perempuan cenderung menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki kualifikasi yang sama.

2. Polarisasi Industri dan Kesenjangan Sektoral

Pasar bebas cenderung menyebabkan polarisasi industri, di mana sektor-sektor tertentu, seperti teknologi dan keuangan, berkembang pesat sementara sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur tertinggal. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antar sektor dalam suatu negara, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan ekonomi. Daerah perkotaan yang menjadi pusat industri maju mengalami pertumbuhan pesat, sedangkan daerah pedesaan tertinggal dengan infrastruktur yang minim. Ketimpangan juga terjadi pada negara yang bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan minyak, di mana keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elite, sementara masyarakat lokal menghadapi dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya.

3. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Tidak Merata

Sistem pasar bebas sering kali menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Individu dan perusahaan yang memiliki akses lebih besar terhadap modal dan teknologi cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki akses terbatas. Akibatnya, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok elit ekonomi. Hal ini juga diperparah dengan sistem perpajakan yang tidak progresif di beberapa negara, yang cenderung menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi.

4. Dampak Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (UMKM, Petani Kecil, dll.)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani kecil sering kali kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam pasar bebas. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah, mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Ditambah lagi, liberalisasi perdagangan sering kali menyebabkan membanjirnya produk impor murah yang semakin memperburuk daya saing usaha kecil.

C. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan dalam Sistem Pasar Bebas

1. Perbedaan Tingkat Pembangunan dan Daya Saing

Negara maju memiliki infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang (Gunung et al., 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam daya saing global, di mana negara berkembang sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) juga masih didominasi oleh negara maju, yang semakin memperlebar kesenjangan teknologi.

2. Struktur Ekonomi Global yang Tidak Adil

Struktur ekonomi global saat ini masih menguntungkan negara-negara yang telah lebih dahulu berkembang. Organisasi perdagangan dan keuangan internasional sering kali

dikuasai oleh negara-negara maju yang menetapkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri. Perjanjian perdagangan sering kali tidak menguntungkan negara berkembang karena adanya hambatan non-tarif dan persyaratan ketat yang sulit dipenuhi.

3. Kekuatan Korporasi Multinasional

Perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. Mereka sering kali memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja murah di negara berkembang tanpa memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi masyarakat setempat. Hal ini memperparah ketimpangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global.

4. Kelemahan Tata Kelola Global

Banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam mengelola ekonomi mereka dengan baik karena lemahnya institusi dan regulasi. Korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta kurangnya kapasitas dalam menyusun kebijakan ekonomi yang efektif semakin memperparah ketimpangan dalam sistem pasar bebas.

Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Sistem ekonomi pasar bebas menekankan pada peran mekanisme pasar dalam mengatur kegiatan ekonomi, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan negara yang dominan. Namun, dalam praktiknya, negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pasar berfungsi secara adil, efisien, dan tidak merugikan masyarakat luas. Intervensi dan regulasi dari negara dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kekurangan pasar (*market failures*), serta mencegah ketimpangan dan kerusakan sosial yang bisa timbul dari liberalisasi ekonomi yang tak terkendali (Hidayatullah, 2019). Berikut ini adalah peran negara dalam sistem ekonomi pasar bebas.

A. Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Ini mencakup pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar, mengelola utang negara, serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Tanpa peran negara, pasar bisa mengalami volatilitas tinggi yang berdampak buruk pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pasar bebas, negara perlu menjaga agar stabilitas makro tidak terganggu oleh gejolak ekonomi global yang cepat berubah.

B. Regulasi untuk Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Meskipun pasar bebas mengedepankan kompetisi, tanpa regulasi yang tepat, pelaku ekonomi besar dapat menciptakan monopoli atau kartel yang justru merusak prinsip dasar persaingan pasar. Negara berperan melalui regulasi anti monopoli dan pengawasan terhadap praktik bisnis untuk memastikan tidak ada dominasi pasar yang membatasi akses dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil.

C. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Negara juga berperan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak pasar bebas, seperti pekerja dengan keterampilan rendah, petani kecil, UMKM, dan masyarakat di wilayah tertinggal. Tanpa kebijakan afirmatif, kelompok ini bisa tergilas oleh persaingan global dan kehilangan mata pencaharian. Bentuk intervensi negara dapat berupa subsidi, pelatihan keterampilan, perlindungan harga hasil pertanian, akses pembiayaan, serta program jaminan sosial.

D. Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha

Pasar yang sehat membutuhkan sistem hukum yang kuat. Negara bertugas menciptakan kerangka hukum dan penegakan yang menjamin hak kepemilikan, kontrak bisnis, penyelesaian sengketa, serta transparansi transaksi. Tanpa hukum yang adil dan tegas, pasar bebas dapat menjadi sarang korupsi, penipuan, dan eksploitasi.

E. Investasi dalam Infrastruktur dan Pendidikan

Negara perlu melakukan intervensi strategis dalam bidang yang tidak dapat atau tidak cukup dilayani oleh sektor swasta, seperti infrastruktur publik (jalan, pelabuhan, listrik), pendidikan, dan kesehatan. Investasi negara dalam bidang ini memungkinkan terciptanya akses ekonomi yang merata, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi pasar.

F. Menangani Eksternalitas dan Melindungi Lingkungan

Salah satu kegagalan pasar yang umum terjadi adalah eksternalitas negatif, seperti polusi, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Negara perlu menetapkan regulasi lingkungan dan instrumen fiskal (seperti pajak karbon) untuk memastikan pelaku usaha menanggung biaya sosial dari aktivitas ekonominya. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian jangka panjang.

G. Redistribusi Kekayaan dan Pendapatan

Dalam sistem pasar bebas, distribusi kekayaan cenderung timpang. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui mekanisme redistribusi, seperti pajak progresif, bantuan sosial, dan program perlindungan sosial lainnya, guna menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Tanpa redistribusi yang memadai, ketimpangan akan meningkat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik.

Studi Kasus dan Dampak Ketimpangan Akibat Perdagangan Bebas

A. Studi Kasus Dampak Perdagangan Bebas di Negara Maju

Negara maju sering kali mengalami dampak negatif dari perdagangan bebas dalam bentuk deindustrialisasi, peningkatan kesenjangan pendapatan, serta dampak ekonomi terhadap komunitas lokal dan wilayah tertinggal. Deindustrialisasi, yaitu penurunan signifikan dalam sektor manufaktur akibat persaingan dengan negara berkembang yang menawarkan biaya produksi lebih murah (Pasaribu et al., 2024). Pabrik-pabrik di negara maju banyak yang tutup atau memindahkan produksinya ke negara lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Akibatnya, banyak pekerja industri di negara maju kehilangan pekerjaan, terutama mereka yang bekerja di sektor manufaktur berat seperti baja, otomotif, dan tekstil

Contohnya pada April 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat mengumumkan kebijakan perdagangan kontroversial berupa penerapan tarif impor global sebesar 10%, bahkan mencapai hingga 49% untuk negara-negara tertentu seperti Vietnam dan Tiongkok. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan utama untuk melindungi industri dalam negeri dan menyeimbangkan kembali neraca perdagangan Amerika Serikat yang selama ini dinilai merugikan pihak domestik. Namun, kebijakan tersebut segera menimbulkan gejolak di pasar global. Nilai pasar saham dunia anjlok drastis, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai hampir USD 5 triliun, mencerminkan ketidakpastian investor terhadap dampak kebijakan proteksionis tersebut. Selain itu, lebih dari 50 negara langsung merespons dengan menghubungi pemerintah AS guna merundingkan kembali kebijakan tarif, mencerminkan meningkatnya ketegangan diplomatik dalam hubungan perdagangan internasional. Di tengah kritik tajam dari para ekonom dan mitra

dagang, pemerintah AS tetap bersikukuh bahwa langkah ini diperlukan demi melindungi kepentingan jangka panjang industri nasional, meskipun berisiko memicu perang dagang berskala besar.

B. Studi Kasus Dampak Perdagangan Bebas di Negara Berkembang

Di negara berkembang, dampak perdagangan bebas sering kali terlihat dalam bentuk persaingan dengan produk impor, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, ketergantungan ekonomi, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Contohnya di Indonesia, pada tahun 2023 platform TikTok Shop memfasilitasi perdagangan bebas produk asing, terutama dari negara Cina yang masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah. TikTok Shop menjadi media atau perantara yang memudahkan terjadinya aktivitas jual beli lintas negara tanpa hambatan tarif atau regulasi ketat. Produk-produk tersebut umumnya dijual dengan harga yang sangat murah, berkat skala produksi besar dan dukungan subsidi dari negara asalnya. Kondisi ini menciptakan situasi persaingan yang tidak seimbang, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang tidak mampu bersaing dari sisi harga maupun volume produksi serta muncul ketimpangan antara produsen lokal kecil dan pedagang besar luar negeri (Wu et al., 2012). Fenomena ini mencerminkan bagaimana perdagangan bebas yang tidak diiringi regulasi yang tepat dapat merugikan produsen dalam negeri, serta memperdalam ketimpangan antara pelaku usaha besar dari luar negeri dan pengusaha kecil di Indonesia. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk membatasi aktivitas perdagangan langsung di platform media sosial, termasuk TikTok Shop, guna melindungi keberlangsungan UMKM lokal dan menjaga keseimbangan pasar.

Peran Negara dalam Mengatasi Ketimpangan dalam Sistem Pasar Bebas

Ketimpangan dalam sistem pasar bebas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konsentrasi kepemilikan modal, perbedaan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta eksploitasi tenaga kerja. Tanpa regulasi yang memadai, kelompok yang lebih kuat dalam perekonomian cenderung semakin mendominasi, sementara kelompok yang lemah semakin terpinggirkan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan menurunnya mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting dalam mengatasi ketimpangan ini melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem pasar bebas, negara dapat mengambil berbagai langkah, antara lain:

A. Kebijakan Perlindungan yang Terukur dan Selektif untuk Industri Domestik

Untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, negara dapat menerapkan kebijakan perlindungan yang selektif, seperti mengenakan tarif impor, memberikan subsidi kepada industri strategis, atau menerapkan regulasi khusus untuk mendukung produksi dalam negeri (Saifulloh, 2020). Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara terukur agar tidak menghambat inovasi dan membuat industri dalam negeri bergantung pada proteksi pemerintah. Misalnya, Kebijakan Substitusi Impor di Indonesia. Pada tahun 1980-an, Indonesia menerapkan kebijakan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Salah satu contohnya adalah program mobil nasional Timor, yang dibuat untuk mengembangkan industri otomotif dalam negeri. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan industri otomotif melalui bea masuk tinggi terhadap mobil impor dan insentif pajak untuk mobil produksi dalam negeri. Hasilnya, industri otomotif domestik

berkembang, dengan merek seperti Toyota dan Daihatsu yang memiliki pabrik di Indonesia. Meskipun program ini menghadapi berbagai tantangan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mendukung industri lokal.

Berikut adalah bentuk-bentuk Kebijakan Intervensi Negara

1. Kebijakan Proteksionisme (Tarif, Kuota, Hambatan Non Tarif)

Proteksionisme melibatkan penerapan tarif impor, pembatasan kuota, dan hambatan non-tarif untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Hambatan non-tarif, seperti standar teknis dan persyaratan kesehatan, sering digunakan untuk membatasi impor dengan alasan melindungi konsumen dan lingkungan .

2. Kebijakan Liberalisasi Perdagangan (Penghapusan Hambatan, Fasilitas Ekspor Impor)

Kebijakan liberalisasi perdagangan melibatkan penghapusan hambatan perdagangan untuk mendorong arus barang dan jasa antar negara. Ini termasuk pengurangan tarif, penghapusan kuota, dan penyederhanaan prosedur ekspor-impor untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Sowrov, 2024).

3. Regulasi Pasar (Anti Monopoli, Perlindungan Konsumen,(Standar Kualitas)

Pemerintah menetapkan regulasi untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan konsumen melalui penetapan standar kualitas dan keamanan produk memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di pasar memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga melindungi hak dan keselamatan konsumen.

4. Kebijakan Fiskal (Pajak Progresif, Subsidi, Transfer)

Kebijakan fiskal mencakup pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Pajak progresif membantu dalam redistribusi pendapatan, sementara subsidi dan transfer tunai digunakan untuk mendukung sektor atau kelompok masyarakat tertentu. Studi menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan bantuan sosial memiliki dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia .

5. Kebijakan Moneter (Pengendalian Suku Bunga, Nilai Tukar)

Melalui bank sentral, pemerintah mengendalikan suku bunga dan nilai tukar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Penyesuaian suku bunga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, sementara intervensi di pasar valuta asing dapat menstabilkan nilai tukar mata uang domestik.

B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Daya saing tenaga kerja sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang baik, pelatihan keterampilan yang relevan, serta kesempatan untuk mengakses teknologi yang mendukung pekerjaan mereka. Dengan demikian, tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Misalnya, Program Kartu Prakerja di Indonesia. Sebagai respons terhadap tantangan ketenagakerjaan, terutama selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja. Program ini menyediakan pelatihan Online serta bantuan finansial bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilannya, sehingga mereka memiliki peluang kerja yang lebih baik di pasar kerja.

C. Implementasi Sistem Pajak yang Progresif dan Efektif

Sistem pajak progresif merupakan cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada individu atau perusahaan dengan pendapatan besar,

sementara kelompok berpendapatan rendah dikenakan pajak yang lebih ringan atau dibebaskan dari pajak tertentu (Pendapatan et al., 2024). Sistem pajak ini harus dikelola dengan baik agar efektif dalam mengurangi ketimpangan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Reformasi Pajak di Skandinavia. Contohnya di negara-negara seperti Swedia dan Denmark menerapkan pajak progresif yang tinggi, terutama bagi individu kaya dan perusahaan besar. Pajak ini digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih merata terhadap kesejahteraan.

D. Menyediakan Program Redistribusi Pendapatan dan Jaring Pengaman Sosial

Untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, negara harus menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan (Ulia & Rayyan, 2024). Ini bisa dilakukan melalui bantuan sosial, subsidi, atau program jaring pengaman sosial seperti tunjangan pengangguran dan asuransi kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin saat terjadi krisis ekonomi atau kenaikan harga BBM. Program ini meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan membantu mereka bertahan di masa sulit, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

E. Mengawasi Pasar agar tetap Kompetitif dan Bebas dari Monopoli

Dalam pasar bebas, sering kali ada perusahaan besar yang mendominasi sektor industri tertentu dan menghambat pertumbuhan bisnis lain. Oleh karena itu, negara harus mengatur dan mengawasi praktik bisnis untuk memastikan bahwa tidak ada monopoli atau praktik anti-persaingan yang merugikan pasar secara keseluruhan. Misalnya, seperti Kasus Google vs Uni Eropa. Uni Eropa pernah memberikan denda besar kepada Google karena dianggap menyalahgunakan dominasi pasarnya. Google dituduh memanipulasi hasil pencarian untuk menguntungkan produk mereka sendiri dan merugikan pesaing. Ini menunjukkan bagaimana regulasi anti monopoli berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar global.

F. Kebijakan untuk Mendukung UMKM dan Sektor Informal agar Berdaya Saing

UMKM dan sektor informal memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, tetapi sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, teknologi, dan pelatihan bisnis (Prasetyo et al., 2024). Oleh karena itu, negara harus mendukung UMKM agar mereka dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar. Misalnya kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Dengan adanya program ini, UMKM dapat memperoleh modal usaha yang lebih mudah, sehingga mereka bisa berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

G. Berpartisipasi dalam Kerja sama Internasional untuk Mengatasi Ketimpangan Global

Ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi dalam suatu negara tetapi juga secara global. Negara-negara maju sering kali memiliki keunggulan dalam perdagangan dan investasi, yang dapat memperburuk kesenjangan dengan negara berkembang. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil bagi semua negara. Strategi hilirisasi di Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme pada komoditas baja/besi merupakan salah satu contoh upaya tersebut (Khairani Alawiyah Matondang & Alawi Parlindungan Hasibuan, Jelita Simanungkalit, 2022).

KESIMPULAN

Perdagangan bebas sebagai sistem ekonomi global modern menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi produksi, perluasan pasar, dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama sistem ini adalah penghapusan hambatan perdagangan dan penyerahan kendali pasar kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Namun demikian, praktik perdagangan bebas juga menimbulkan berbagai ketimpangan baik antarnegara maupun di dalam suatu negara. Negara-negara maju cenderung mendominasi pasar global dan memperoleh keuntungan lebih besar, sementara negara berkembang sering kali terjebak sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Di sisi lain, dalam skala domestik, perdagangan bebas memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta antara sektor-sektor industri yang berbeda.

Peran negara menjadi sangat penting dalam meredam dampak negatif dari sistem pasar bebas. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri strategis, dan memastikan bahwa kelompok rentan tetap terlindungi. Kebijakan seperti proteksionisme selektif, pajak progresif, subsidi, jaminan sosial, serta investasi dalam pendidikan dan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan. Negara juga harus mengawasi pasar agar tetap kompetitif dan tidak dimonopoli oleh segelintir pelaku ekonomi besar.

Oleh karena itu, keberhasilan perdagangan bebas dalam menciptakan kemakmuran ekonomi yang merata sangat bergantung pada keseimbangan antara kebebasan pasar dan campur tangan negara. Negara tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjaga keadilan ekonomi agar sistem pasar bebas tidak menjadi alat reproduksi ketimpangan, melainkan menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawon, S. P., Palandeng, E. R., & Baftim, F. (2020). Dampak Perdagangan Bebas pada Era Globalisasi di Indonesia dalam UU No. 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas. *Lex Privatum*, 8(2), 154–163.
- Budiyadi, E. (2017). Impact of Trade Liberalization on Economic growth in Indonesia. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.15373/2249555x/may2014/105>
- Crisela, A., Saleh, M. Z., & Jaya, U. P. (2024). Dampak Perdagangan Bebas AFTA Terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(4), 228–239.
- Dariah, A. R. (2005). Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas. *Mimbar*, 21(1), 115–126. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/167/pdf>
- Dewi, N. A. (2024). Dinamika Pemikiran Ekonomi : Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(1), 72–83.
- Drozdz, J., & Miśkinis, A. (2011). Benefits and Threats of Free Trade. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Ekonomia*, 14(nr 201), 40–48.
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisis Penyebab , Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339.
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah : Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 183–208.

- Indriastuti, S. (2005). PEMBENTUKAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA BAGI PETANI DI INDONESIA. *MEDIARGO, Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1(2), 24–37.
- Jati, W. R. (2012). KETIMPANGAN UTARA-SELATAN DALAM GLOBALISASI. *Jurnal Studi Hubungan Nasional*, 2(2), 83–102.
- Jung, J. (2021). Economic transformation and sustainable development through multilateral free trade agreements. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su13052519>
- Khairani Alawiyah Matondang, A. H., & Alawi Parlindungan Hasibuan, Jelita Simanungkalit, R. (2022). STRATEGI HILIRISASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PADA KOMODITAS BAJA / BESI. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3371–3377. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto). *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>
- Manik, M. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 13–20.
- Meiriza, M. S. (2023). Analisis Perbandingan Penentuan Harga dalam Pemikiran Adam Smith dan Karl Marx. *Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, Dan Investasi*, 1(2), 185–192.
- Murwani, S., Lestari, N. I., & Sriyanto, A. (2025). Trade Dynamics and Export Growth : Examining the ASEAN- China Free Trade Area ' s Influence on Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia*, 15. <https://doi.org/10.4108/eai.11-9-2024.2354431>
- Nanin Koeswidi Astuti, R. D. (2024). Regulasi Persaingan Usaha dalam Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada Securities Crowdfunding. *Honeste Vivere Journal*, 34(1), 100–119.
- Pasaribu, C., Sirojuzilam, & Syafii, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deindustrialisasi di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1712–1720. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1573>
- Pendapatan, K., Pendidikan, B., Sosial, B. B., & Daerah, P. (2024). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 296–300.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>
- Purba, B., Sihombing, A. E., Azizah, L. N., & Purba, A. A. (2024). Analisis Penerapan serta Hambatan Pemikiran Tokoh–tokoh Ekonomi Klasik terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 148–159. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1151>
- Saggi, K., Wong, W. F., & Yildiz, H. M. (2022). The role of non-discrimination in a world of discriminatory preferential trade agreements. *Canadian Journal of Economics*, 55(1), 174–212. <https://doi.org/10.1111/caje.12586>
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193>
- Schumacher, R. (2013). Deconstructing the Theory of Comparative Advantage. *World Economic*

Review, 2, 83–105.

- Setiawati, R. I. S. (2021). Teori Modern Dalam Perdagangan Internasional. In *Buku Ajar Bisnis Dan Perdagangan Internasional*.
- Sowrov, S. M. T. H. (2024). Trade Openness , Tariffs and Economic Growth : An Empirical Study from Countries of G-20. *Arxiv*, 1–36.
- Sri Mentari Pombu, Y., & Yeni, H. (2023). Dampak Implementasi Perdagangan Bebas pada Sektor Ekonomi di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2712>
- Stiedewantara. (2012). *BAB III METODE PENELITIAN, 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian*. 22–25. [https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB III.pdf](https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf)
- Ulia, A. R., & Rayyan, S. (2024). GOVERNMENT EFFORTS TO OVERCOME ECONOMIC INEQUALITIES IN SOCIETY BY REDISTRIBUTING NATIONAL INCOME. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(10), 8090–8099.
- Utami, R. N., Mohammad Rezy, R., & Lailatul Maftukhah, W. (2022). Pengaruh Teori Laissez Faire terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 127–140. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i2.901>
- Wibowo, K. P., Pangestuty, F. W., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *JDESS*, 2(3), 539–549.
- Wu, Q., Sang, Y., Wang, D., & Lu, Z. (2012). Case Study of Alibaba ' s Taobao and ByteDance ' s TikTok. *Woodstock '18: ACM Symposium on Neural Gaze Detection, June 03â•fi05, 2018, Woodstock, NY*, 1(1), 1–30.